

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dewasa ini meningkatkan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat, yang dikenal dengan pembangunan nasional. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah menganut azas pemerataan, demikian pula untuk kepentingan bangsa serta hajat hidup orang banyak, program pembangunan tersebut memiliki skala prioritas pembangunan yang diutamakan, yaitu pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat luas serta mempunyai implikasi penting bagi maju dan mundurnya bangsa. Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan yang dapat prioritas utama oleh karena dengan pendidikan selain dikehendaki dapat sejajar dengan bangsa maju lainnya, juga karena pendidikan memiliki implikasi langsung dengan kualitas kehidupan warga negara dan peradaban bangsa Indonesia.

Pendidikan yang diprioritaskan pemerintah adalah pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Wawasan fungsi dan tujuan pendidikan diatas, merupakan gambaran bahwa pendidikan tidak bermakna individual ataupun kelompok sosial tertentu, melainkan untuk seluruh komponen dan elemen bangsa. Dengan demikian masyarakat umumnya serta orang tua siswa khususnya merupakan satu kesatuan utuh dalam upaya mendukung tercapainya sasaran fungsi serta tujuan pendidikan.

Sebagai satu kesatuan dalam kebutuhan pembangunan bangsa, fungsi dan peran seluruh komponen Bangsa memiliki implikasi yang sangat mendukung akan ketercapaian tujuan, atau sasaran yang dicita-citakan. Oleh sebab itu dalam bidang operasional penyelenggaraan pendidikan, peran orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya merupakan bagian yang tak kalah pentingnya dalam mendukung kesuksesan pencapaian tujuan pendidikan.

Uraian tentang perlunya peran serta orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatas, sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yakni terutama tentang prinsip penyelenggaraan Pendidikan (Bab III) pasal 4 ayat 1 disebutkan "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Adapun tentang hak dan kewajiban orang tua. Diuraikan berturut-turut pada pasal 8 dan 9 sebagai berikut "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Serta masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan".

Dengan demikian, upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan terutama pembangunan dalam bidang pendidikan, benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat, dan untuk mewujudkan hal tersebut peran serta

masyarakat merupakan bagian integral dalam kata kunci kesuksesan pembangunan pendidikan.

Kaitannya dengan otonomisasi, maka demokratisasi sebagaimana disebutkan diatas yang terpenting adalah mengarah pada dua hal, yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan pemerintah pusat akan berkurang dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian demokratisasi penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pemberdayaan masyarakat, dengan memperluas partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Demikian pula halnya tentang partisipasi orang tua, sebagaimana diatur oleh keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 tentang pembentukan komite sekolah diharapkan sebagai badan non profit atau non politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh orang tua, sekolah dan masyarakat. Melalui komite sekolah orang tua dapat membantu keseluruhan proses pembelajaran disekolah, baik dukungan gagasan, dana, sarana prasarana maupun tenaga. (Engkoswara dan Komariah, 2010:298-299)

Uraian tentang peran serta atau partisipasi masyarakat termasuk orang tua siswa di atas, cukup beralasan adanya, sebab salah satu usaha untuk mengembangkan potensi manusia adalah melalui pendidikan. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan seharusnya berada bersama pemerintah, masyarakat, dan para orang tua peserta didik. Namun kenyataannya sampai saat ini yang lebih berperan adalah pemerintah. Peranan pemerintah sudah banyak seperti menyelenggarakan sarana dan prasarana, ketenagaan, dan kurikulum, sedangkan peran serta orang tua siswa selama ini masih sebatas pada pemberian sumbangan dana iuran Komite, hal ini pun masih sangat rendah, masih dibawah garis standar minimum. Demikian pula peran masyarakat masih belum optimal berpartisipasi terhadap dunia pendidikan.

Implikasinya bagi peningkatan mutu pendidikan, kebijakan manajemen berbasis sekolah merupakan suatu strategi secara totalitas mendorong mutu pendidikan melalui peran aktif warga sekolah. Adapun terlaksananya MBS sangat ditentukan oleh 3 (tiga) pilar utama, yaitu (1) transparansi dan akuntabilitas publik, (2) peran serta masyarakat, dan (3) PAKEM, pembelajaran yang berorientasi pada upaya bagaimana siswa aktif sebagai subyek (bukan objek) pembelajaran dan senang belajar. Yang menjadi pertanyaan krusial saat ini adalah bagaimana upaya sekolah agar terjadi akuntabilitas publik yang sehat sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat membudaya di dalam aktivitas keseharian sekolah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, artikel ini ditulis untuk mendiskusikan implementasi pilar utama implementasi MBS yaitu pilar ke 1 dan 2 yang terkait dengan transparansi/akuntabilitas publik dan peran serta masyarakat dalam bentuk

implementasi SPMP melalui EDS dan MSPD. (Kistono. 2011: 2)

Dalam otonomi bidang organisasi, sekolah kemudian diminta untuk mengganti asosiasi orang tua murid, yang dulu dikenal dengan nama BP3 (Badan Pembantu Pelaksana Pendidikan) dengan tugas utamanya sebagai pengumpul dana sumbangan dari orang tua murid untuk sekolah, menjadi Komite

Sekolah/Madrasah dengan berbagai tugas yang tidak sekedar menjadi 'kasir', tapi juga ikut memikirkan, merancang, mengawasi, dan bila perlu ikut melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program peningkatan mutu sekolah. Haryadi, Y. (dkk) (2006) menyatakan bahwa peran Komite Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut (1) sebagai advisory agency, (2) supporting agency, (3) controlling agency, dan (4) mediator agency, (dalam Kistono, 2011: 3)

Dengan adanya perubahan paradigma pemerintahan dewasa ini, yakni perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi, menghendaki peran serta masyarakat termasuk orang tua siswa untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan. Hal demikian identik dengan tujuan otonomi daerah yaitu memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pola kebijakan pembangunan bidang pendidikan sebagaimana uraian diatas, khususnya pada SMP Negeri 3 Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo umumnya belum berlangsung sesuai Amademen Undang-Undang

Sisdiknas dan Otonomi Daerah. SMP Negeri 3 Wonosari sejak awal pendiriannya hingga kini belum secara maksimal mendapatkan dukungan partisipasi dari orang tua siswa.

Adapun partisipasi yang menonjol terhadap penyelenggaraan pendidikan diantaranya: (a) Kehadiran dalam setiap rapat (b) Perhatian pada kebijakan tata tertib sekolah pada keikutsertaan aktif pengawasan kehadiran dan keaktifan belajar siswa (c) Partisipasi kegiatan ekstra, berupa perayaan hari-hari besar keagamaan, melalui peran dukungan konsumsi dan kehadiran (d) Berpartisipasi lainnya yang bersifat tidak mengikat

Namun hal yang perlu dibanggakan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan terbesar dari pendanaan Pemerintah, namun sekolah ini tidak kalah eksistensinya dengan sekolah negeri lainnya. Dalam hal partisipasi akademik hasil ujian Nasional, berturut-turut dua tahun terakhir mencapai prestasi kelulusan 100%, selain itu prestasi pada pada bidang non akademik sekolah dengan jumlah siswa 106 siswa ini memiliki beberapa prestasi baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan observasi awal pada di SMP Negeri 3 Wonosari, sesuai uraian diatas, dapat diketahui bahwa partisipasi orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan secara umum masih terbatas pada pemberian fasilitas yang sangat sederhana dan baru terbatas pada yang berhubungan pada yang berhubungan dengan kegiatan belajar anak. Sedangkan peran-peran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pada pemberian motivasi serta keterlibatan orang tua dalam kelembagaan sekolah masih relatif kurang. Hal

lainnya adalah masih kuatnya paradigma bahwa tanggung jawab pendidikan anak merupakan “Urusan sekolah” karenanya “Redefinisi” peran-peran orang tua terhadap pendidikan anak perlu dilakukan sejalan dengan tuntutan terhadap kualitas pendidikan. Untuk itu kesamaan visi dan misi antara pemerintah serta orang tua siswa dalam pembangunan pendidikan anak secara utuh dan menyeluruh, serta ditumbuh kembangkan secara dini, guna meningkatkan kualitas pendidikan anak secara khusus, maupun mutu pendidikan dalam arti yang lebih luas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan partisipasi orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan memformulasikannya dalam judul sebagai berikut “*Pengaruh Partisipasi Orang Tua Siswa Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 3 Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo*”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

- a. Orang tua siswa belum berpartisipasi aktif terhadap penentuan kebijakan dan program sekolah, indikator ini dapat diketahui kurangnya kehadiran orang tua siswa dalam rapat kebijakan maupun program sekolah, demikian pula terhadap partisipasi pemikiran, umumnya orang tua siswa bersifat pasif dalam mengikuti rapat.

- b. Demikian pula terhadap partisipasi pengawasan pelaksanaan kebijakan atau program sekolah, pada umumnya orang tua siswa menunjukkan sikap kurang peduli terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program sekolah.
- c. Adapun partisipasi terhadap kegiatan ekstra, pertemuan rutin komite, dan pembiayaan pendidikan, belum seluruhnya orang tua siswa memberikan dukungan partisipasi secara optimal

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah terdapat pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 3 Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana atau seberapa besar pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 3 Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan kontribusi variabel partisipasi orang tua siswa terhadap variabel penyelenggaraan

pendidikan, maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi peningkatan dan pengembangan partisipasi oarang tua siswa, implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMP Negri 3 Wonosari
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi orang tua siswa senantiasa mengoptimalkan peran sertanya terhadap penyelenggaraan pendidikan putra-putri mereka
3. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi wahana bagi orang tua siswa untuk lebih berperan aktif bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan putra-putri mereka